



02 GOVERNMENTTODAY
Diskon Listrik
Hanya Pelanggan 450-900 VA

05 HAJI 2025
Risiko Tinggi Puncak Haji, Jamaah
Diimbau Selalu Bersama Rombongan

10 LISTSTYLE
Perempuan Kesenian Lebih Suka
Makanan Manis

PM China Bawa Investasi US\$ 10 M untuk Indonesia

Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Perdana Menteri China Li Qiang (kanan) melakukan inspeksi barisan saat upacara kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/5/2025). kunjungan PM China tersebut tidak semata bersifat seremoni diplomatik. Melainkan telah menghasilkan bentuk kerja sama dan investasi konkret senilai US\$ 10 Miliar. Berita lengkap, baca halaman 4.(antara.ist)

COBOT MENKES BUDI BERGEMA

Desakan agar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dicopot menggema. Tak hanya satu pihak, ketidakpuasan atas kinerjanya mencuat dari kalangan dokter hingga fakultas kedokteran. Pernyataan dan kebijakannya dinilai kerap di luar batas. Hampir 400 guru besar Fakultas Kedokteran se-Indonesia menyatakan kecewa dengan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bahkan, agenda pertemuan dengan para dekan fakultas kedokteran di sejumlah perguruan tinggi yang Jumat (23/5/2025) batal. Peralannya, tidak ada satupun undangan yang hadir. Sebelumnya, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) juga minta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap Menteri Budi karena membuat kolegium tandingan. Kolegium versi Kemenkes tersebut dipilih secara online voting. Bukan berdasarkan standarisasi dunia kesehatan sebagaimana mestinya. Salah satu korbannya adalah Dr Piprim Basarah Yanuarso SpA(K), staf pengajar senior di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM, Jakarta, yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Dia dipindahtugaskan secara mendadak dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke RS Fatmawati. Tak hanya itu, beberapa waktu terakhir Menkes Budi melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Mulai dari "Jokowi Bos Saya" hingga sebut orang bergaji Rp 15 juta/ bulan lebih sehat dan ukuran celana jeans di atas 32-33 berisiko lebih cepat meninggal dunia.

Pernyataan-pernyataan Kontroversial

"Jokowi Bos Saya"

Saat bersilaturahmi ke rumah Jokowi, Menkes Budi menyebut Jokowi masih bosnya, meski kini menjabat di era Presiden Prabowo.

Gaji Rp 15 Juta

Dalam acara di Jakarta (17/5/2025), Budi menyatakan orang bergaji Rp 15 juta lebih sehat dan pintar dibanding yang bergaji Rp 5 juta.

Gaji Rp 15 Juta

Dalam peluncuran layanan kesehatan (14/5/2025), Budi menyebut pria dengan ukuran celana jeans di atas 32-33 berisiko obesitas dan kematian lebih cepat.

Harta Budi Gunadi

TOTAL
RP 208.24 MILIAR

(LHKPN tanggal 19 Januari 2025)

Tanah & bangunan
Rp 130 Miliar

Alat transportasi dan mesin
Rp 1.4 Miliar

Harta bergerak lainnya
Rp 3.66 Miliar

Surat berharga:
Rp 82.65 Miliar

Kas dan setara kas
Rp 27.86 Miliar

UTANG
Rp 10.33 Miliar

Baca Hal 11...

Diskon Listrik 50% Bakal Berlaku Lagi 5 Juni

MENKO AIRLANGGA: HANYA PELANGGAN 450-900 VA

Diskon tarif listrik sebesar 50% akan kembali digelar. Direncanakan mulai berlaku pada 5 Juni 2025, hanya untuk pelanggan 450-900 VA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan pemerintah akan mulai memberlakukan insentif potongan tarif listrik sebesar 50% pada 5 Juni 2025.

"Nanti ya tanggal 5 Juni akan diberlakukan dan akan dirapatkan kembali. Dan itu di bawah 1.300 KWh," ujar Airlangga singkat di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (25/5/2025).

Walau begitu, Airlangga belum merinci skema lengkap insentif pemotongan tarif listrik tersebut. Airlangga mengamini bahwa poin-poinnya dari skema tersebut akan di-breakdown pada 5 Juni nanti.

"Ya [di-breakdown pada 5 Juni nanti]," kata Airlangga.

Dia mengungkap alasan pelanggan listrik PLN dengan daya 2.200 VA tak lagi masuk daftar penerima diskon. Padahal dalam paket stimulus sebelumnya pada awal tahun, pelanggan dengan daya tersebut termasuk yang mendapat manfaat.

"Ya dari evaluasi kemarin, kita mau masyarakat yang di bawah," ujar Airlangga.

Pemerintah kembali menghadirkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama Juni-Juli 2025 untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA. Keringanan ini sebagai salah satu dari 6 paket insentif atau stimulus ekonomi kuartal II 2025.

Airlangga Hartarto mengatakan tujuan dari pemberian insentif tersebut untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 berada di kisaran 5 persen.

"Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi," ujar Airlangga.

Sekadar informasi, Pemerintah akan mengguyur enam paket insentif ekonomi pada 5 Juni 2025, demi mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2025 dan kuartal III/2025. Enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut yaitu diskon



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Sejauh ini untuk diskon tarif listrik, skemanya sama seperti pada Januari dan Februari lalu. Hanya saja, jika pada Januari—Februari 2025 yang berhak menerima manfaat adalah pelanggan PLN dengan daya hingga 2.200 VA maka kini yang akan menerima hanya pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA.

Bantuan Upah Karyawan dan Guru Honorer

Tak hanya itu, pemerintah juga akan menyalurkan Bantuan Subsidi

Upah (BSU) bagi para pekerja mulai 5 Juni 2025. Bantuan tunai ini ditujukan kepada guru honorer dan karyawan dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta atau setara Upah Minimum Provinsi (UMP).

BSU merupakan salah satu dari enam paket insentif yang tengah dipersiapkan pemerintah untuk mendukung daya beli masyarakat. "BSU, kemudian ada bantuan-bantuan untuk menunjang daya beli, itu sedang dipersiapkan. Nanti akan diberlakukan per 5 Juni," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Program serupa sebelumnya telah disalurkan pada 2022 sebagai respons

terhadap dampak ekonomi pandemi Covid-19. Saat itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan penyaluran BSU senilai Rp 600.000 sekali bayar kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta.

Namun, menurut Airlangga, nilai BSU tahun ini lebih kecil. "Tidak, tidak segitu (nilainya). Lebih kecil," katanya. Ia menambahkan pemerintah telah menghitung perkiraan total anggaran yang dibutuhkan, namun jumlah pastinya belum diumumkan karena masih dalam tahap finalisasi. (wid,rls,ant,kum/dya)

DAFTAR INSENTIF PEMERINTAH MULAI 5 JUNI

Diskon transportasi

- Bantuan pertama adalah diskon transportasi yang berlaku untuk moda angkutan laut, kereta api, sampai pesawat. Pemberian diskon berlaku selama masa libur sekolah, yakni Juni 2025 dan Juli 2025.

Potongan tarif tol

- Kedua, potongan tarif tol yang ditargetkan menyasar 110 juta pengendara.

Diskon tarif listrik

- Ketiga, diskon tarif listrik 50 persen selama Juni 2025-Juli 2025 untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

Tambahan alokasi bansos

- Pemerintah juga akan memberikan tambahan alokasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan subsidi upah (BSU)

- Pemerintah akan kembali memberikan bantuan subsidi upah (BSU), seperti yang pernah disalurkan pada masa pandemi Covid-19. Bantuan ini berlaku untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

Perpanjangan program

diskon iuran JKK

- Bantuan yang terakhir adalah perpanjangan program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya.

DPR: Target Ekonomi Tumbuh 5,8% di 2026 Terlalu Percaya Diri

ANGGOTA Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyebut target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 persen-5,8 persen terlalu optimistis.

"Bahkan cenderung terlampau percaya diri (over confidence), proyeksi IMF dan World Bank terhadap perekonomian kita tahun 2026, hanya akan tumbuh sebesar 4,8 persen, sedikit meningkat dibandingkan proyeksi tahun 2025 sebesar 4,7 persen," katanya dikutip Minggu (25/5/2025).

Doktor Ekonomi Syariah ini mengingatkan realisasi Triwulan I 2025 yang lalu perekonomian Indonesia hanya tumbuh sebesar 4,87 persen (year on year/yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang masih tumbuh 5,02 persen.

"Artinya pertumbuhan ekonomi nasional sedang dalam kondisi yang stagnan dan melambat. Jadi dua kondisi ini, hendaknya menjadi perhatian dan ukuran bagi Pemerintah

untuk menentukan target pertumbuhan ekonomi kita tahun 2026," ujarnya.

Meskipun demikian Anis menyebut bisa memahami, menurutnya Pemerintah ingin membangun pandangan dan sikap optimisme bahwasanya perekonomian global dan nasional akan membaik pada tahun 2026.

"Tapi realistisnya target pertumbuhan ekonomi nasional dalam kisaran 5,0 persen- 5,02 persen pada tahun 2026," ungkapnya.

Legislator PKS ini menyebut belum melihat kebijakan efisiensi ini memberikan dampak bagi perekonomian, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sebagaimana yang kita ketahui, kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah tidak difokuskan untuk memperbaiki kualitas pembiayaan dan sektor-sektor pendorong pertumbuhan tetapi

sebagian besar untuk MBG dan Danantara, tetapi jika di tahun 2026 nanti Pemerintah konsisten melakukan kebijakan efisiensi anggaran tidak prioritas dan kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas penggunaan anggaran untuk sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan, mungkin kita berharap hasilnya akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi," katanya. (din,rls,ist,ant/dya)



(Ilustrasi) Korpri menyampaikan usulan kenaikan BUP ASN baik pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional.(dok)

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengulirkan wacana kenaikan batas usia pensiun (BUP) bagi aparatur sipil negara (ASN) menjadi 70 tahun. DPR RI mengingatkan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Uslan kenaikan Batas Usia Pensiun (BUP) ASN oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) telah diajukan ke Presiden Prabowo Subianto melalui surat resmi bernomor B-122/KU/V/2025.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menilai, hal ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut dengan kajian yang lebih mendalam.

"Terkait dengan (usia pensiun) ASN untuk diperpanjang, ya sebaiknya itu dikaji dulu lebih lanjut," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Menurutnya, yang perlu menjadi fokus dalam batas usia pensiun ASN adalah terkait tingkat produktivitasnya. Dia menekankan, agar perpanjangan batas usia pensiun tak membebani APBN.

"Yang penting bagaimana kemudian produktivitas dari hal tersebut dan apakah itu memang kalau diperpanjang produktivitas dari kepegawaian itu akan lebih baik," ucap Puan.

"Jadi apakah kajiannya itu sudah ada, dasarnya apa. Satu lagi, jangan kemudian nanti membebani APBN," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Bahtra Banong mengatakan pihaknya akan menampung usulan Korpri agar batas usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dinaikkan menjadi 70 tahun.

"Yang namanya usulan ya bagus-bagus aja ya, tapi kita lihat substansinya nanti apakah memang usia pensiun itu perlu ditambah atau sudah cukup dari sekarang ini," kata Bahtra.

Bahtra mengatakan, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut substansi dari usulan ini dan melihat apakah memang bisa mendomplang produktivitas ASN.

"Saya lihat sih kita pengen bahwa baik ASN kita ataupun yang lain kan kita pengennya bahwa selain mereka digaji kita pengen lebih produktif agar pelayanan publik bisa maksimal, jadi substansinya di sana," kata Bahtra.

Dalam aturan yang berlaku saat ini Pegawai diatur batas usia pensiun PNS adalah 59 tahun hingga maksimal atau mencapai 65 tahun. Regulasi ini untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Adapun usulan perpanjangan ini belakangan muncul berbarengan dengan mencuatnya rencana pemerintah dan DPR RI untuk merevisi UU ASN.

Formasi akan Makin Sempit

Sementara, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyinggung soal formasi kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS) yang semakin sempit dengan usulan itu.

Dia memandang bahwa

Usulan Usia Pensiun ASN 70 Tahun PUAN: JANGAN SAMPAI BEBANI APBN

penambahan usia pensiun itu akan berdampak pada proses regenerasi di dalam tubuh birokrasi ASN di Tanah Air.

"Situasi saat ini saja, dengan kebijakan penataan ASN yang belum tuntas, seperti kebijakan terhadap tenaga honorer, sudah banyak 'fresh graduate' yang tidak bisa tertampung menjadi PNS karena formasi kebutuhannya sempit," kata Doli.

Dia lantas berkata, "Bayangkan kalau usia pensiunnya semakin lama, maka formasi kebutuhan untuk ASN baru pun pasti semakin kecil."

Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan perspektif lainnya yang perlu dijadikan pertimbangan ialah penambahan usia pensiun akan berkonsekuensi dengan penyediaan tambahan anggaran negara.

Dia juga menilai perlu dilakukan kajian terkait hubungan antara usia dan produktivitas, bila alasan yang digunakan untuk memperpanjang usia pensiun ASN merupakan konsekuensi meningkatnya rata-rata usia produktif manusia di Indonesia.

"Kita perlu mengkaji dan harus

diikuti evaluasi secara keseluruhan ASN kita apakah selama ini setiap individu ASN benar-benar produktif dan berkinerja baik atau tidak," ujarnya.

Dia menambahkan perspektif lainnya yang perlu dijadikan pertimbangan ialah konsep pelayanan publik pada birokrasi pemerintah ke depan yang akan berkembang ke arah digitalisasi.

"Yang minimal akan membutuhkan kapasitas kemampuan yang lebih spesifik dari ASN, kalau tidak bisa disebut akan mengurangi kebutuhan jumlah 'man power' dalam tubuh ASN kita," tuturnya.

Untuk itu, dia menekankan usulan Korpri agar batas pensiun ASN diperpanjang hingga usia 70 tahun harus dilakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu sehingga mempunyai alasan yang tepat sebagai landasan.

"Jadi masih sangat banyak hal yang perlu dikaji secara mendalam dan butuh besar sekali effort untuk mengantisipasi konsekuensi dari penambahan usia pensiun itu," kata dia.(din,ist,kum,kcm/dya)

Pemerintah Sebut Belum Dibahas Khusus

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengklaim, Istana sudah menerima usulan kenaikan Batas Usia Pensiun (BUP) ASN oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

"Ya, sebagai sebuah usulan sudah disampaikan," kata Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Namun, Prasetyo Hadi mengaku, Istana hingga saat ini belum membahas secara khusus mengenai usulan tersebut."Tetapi belum kita bahas secara khusus mengenai yang tersebut," ungkap dia.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini menilai banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum usulan penambahan usia pensiun diakomodasi.

"Penentuan BUP pegawai ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Seperti pembinaan karier, pengembangan

kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN," tambah dia," ujar Rini.

Rini menyebutkan bahwa penambahan usia pensiun bisa berdampak ke beberapa hal. Salah satunya terkait dengan anggaran negara.

"Kami menilai bahwa usulan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) juga bisa berpotensi menimbulkan tekanan pada ketersediaan anggaran negara," kata Rini.

Selain itu, ia juga menilai bahwa penambahan batas usia pensiun ASN bisa mengganggu sistem karier.

"Kami menilai bahwa usulan perpanjangan BUP bisa mengganggu sistem karier yang sudah ada," ujar dia.

Di sisi lain, kata Rini, sistem saat ini sudah berjalan dengan baik.

Menurutnya, penting bagi birokrasi untuk terus memberi ruang kepada generasi muda agar bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan."Regenerasi dalam

birokrasi perlu terus dilakukan dengan melibatkan generasi baru," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh mengatakan peningkatan harapan hidup masyarakat Indonesia menjadi salah satu alasan utama usulan ini. "Ini saya lihat tingkat usia semakin tinggi serta harapan hidup yang semakin bagus sehingga wajar BUP ASN ditambah, baik yang berada pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional," ujar Zudan dalam keterangan tertulis.

Korpri mengusulkan kenaikan usia pensiun untuk berbagai jabatan. Untuk jabatan manajerial, pejabat tinggi utama diusulkan pensiun pada usia 65 tahun dari sebelumnya 60 tahun. Pejabat tinggi madya menjadi 63 tahun, pejabat tinggi pratama 62 tahun, dan pejabat administrator atau pengawas menjadi 60 tahun dari sebelumnya 58 tahun.(wid, din,ist/dya)

USAI KUNJUNGAN PM CHINA, PROYEK KERETA CEPAT LANJUT SAMPAI SURABAYA

Kunjungan kerja Perdana Menteri (PM) China, Li Qiang salah satunya membicarakan peluang kerja sama investasi di sektor perkereta-apian. Rencananya pembangunan Kereta Cepat Bandung-Surabaya dilanjutkan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana proyek Kereta Cepat Bandung-Surabaya bakal tetap dijalankan. Kata Menko Airlangga, proyek kereta cepat Bandung-Surabaya tetap akan digarap China, sebentar lagi masuk tahap studi bersama.

"Studi, studi (proyek kereta cepat) Bandung-Surabaya. Studi dahulu, studi," kata Menko Airlangga, di Jakarta, dikutip Minggu (24/5/2025).

Diketahui, saat kereta cepat Jakarta-Bandung dijalankan, muncul pembengkakan biaya alias cost overrun US\$1,2 miliar, atau nyaris Rp20 triliun (kurs Rp16.500/US\$).

Sayangnya, Menko Airlangga tidak menjelaskan apakah proyek pembangunan kereta api yang ditawarkan China ini, adalah kereta cepat atau semicepat. "Tentu saja, pemerintah masih harus menunggu hasil kajian yang akan dilakukan," kata Menko Airlangga.

Kata Menko, gagasan melanjutkan proyek kereta ini hingga ke Surabaya, masih dalam tahap awal. Sehingga belum ada bayangan untuk pembentukan konsorsiumnya seperti apa. Jadi semuanya masih harus menunggu hasil dari studi bersama China. "Belum diputuskan," ujarnya.

Sebelumnya, kehadiran PM Li di Indonesia sejak Sabtu (24/5/2025) hingga Senin (26/5/2025), akan membahas proyek pembangunan kereta cepat lanjut ke Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, kedatangan PM Li dibarengi dengan sejumlah komitmen investasi baru di Indonesia, termasuk sektor perkeretaapian.

Komitmen tersebut tidak termasuk dari komitmen investasi US\$10 miliar dari China saat kunjungan Presiden Prabowo

Subianto ke Beijing menemui Xi Jinping awal November 2024.

"(Komitmen) yang 10 miliar dolar AS itu, sudah berjalan. Kini sifatnya baru ada kesepakatan dengan dunia usaha, atau private sector, dan ada juga dengan BUMN. Ini proyek baru, tentunya kami dari Kementerian Investasi akan mengawal agar proyek berjalan baik dan sesuai harapan," kata Menteri Rosan, Jakarta, Sabtu (24/5/2025).

Rosan mengelaborasi proyek baru yang akan dikerjasamakan dengan China kali ini menyangkut investasi untuk gerbong kereta api bersama BUMN dan badan usaha lainnya, lalu juga di bidang penghiliran mineral, termasuk baterai EV, hingga di sektor kimia.

Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyebut perpanjangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga ke Surabaya memang masih dalam proses studi kelayakan, setelah pada tahun lalu pemerintah telah melakukan prastudi.

Proyek kereta cepat menuju ke Surabaya ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 296/2020 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Pada awal 2024, pemerintah sempat berwacana bahwa proyek ini akan dikembangkan untuk jalur hingga ke Yogyakarta terlebih dahulu untuk tahap awal.

Direktur Utama KCIC, Dwiwana Slamet Riyadi, mengatakan,



Presiden Prabowo Subianto (kanan) mempersilakan Perdana Menteri China Li Qiang (kedua kiri) untuk duduk saat pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/5/2025). (Dok)

pemerintah tidak akan langsung membangun hingga ke Surabaya karena keterbatasan waktu dan biaya.

"Sekarang sedang penggodokan untuk perencanaan. Ada kemungkinan jalurnya dibangun sampai Yogyakarta dahulu. Kalau [langsung] sampai ke Surabaya [terkendala] masalah waktu dan biaya," ujar Dwiwana akhir Januari 2024.

Namun, Dwiwana enggan menjelaskan dengan lengkap ihwal daerah mana saja yang bakal dilintasi oleh megaprojek tersebut. Sebab, hal ini dilakukan untuk mencegah adanya spekulasi yang berpotensi menaikkan harga tanah.

4 Kesepakatan

Pemerintah Indonesia dan China telah menandatangani empat kesepakatan ekonomi.

Kesepakatan ekonomi tersebut ditandatangani dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU), dan disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Kesepakatan yang pertama adalah MoU antara Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China. Hal itu mengenai kerangka kerja sama untuk mendorong transaksi bilateral dalam mata uang lokal.

Penandatanganan itu dilakukan Gubernur BI Perry Warjiyo, serta Gubernur People's Bank of China Pan Gongsheng.

Sedangkan MoU kedua melibatkan Dewan Ekonomi Nasional dan National Development and Reform Commission China (NDRC). Kesepakatan itu mengenai kerja sama dalam kebijakan pembangunan ekonomi.

MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua NDRC Zheng Shanjie.

Yang berikutnya, kesepakatan dilakukan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan China. Kerja sama ini bertujuan memperkuat hubungan ekonomi kedua negara di sektor industri dan rantai pasok.

Kesepakatan ini ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan China Wang Wentao.

Untuk kesepakatan keempat dilakukan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dengan Kementerian Perdagangan China, serta Pemerintah Provinsi Fujian China. MoU ini membahas kerja sama program Two Countries Twin Parks antara kedua negara. (wid,rls ist,ant/dya)

Prabowo Sebut China Mitra Dagang Terbesar

PRESIDEN Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa Cina merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Adapun nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Cina telah melebihi US\$ 130 miliar pertahun.

Hal ini disampaikan dalam Prabowo dalam kata sambutannya di hadapan Perdana Menteri Cina, Li Qiang, dan para pelaku usaha kedua negara dalam agenda Indonesia-China Business Reception di Jakarta, Sabtu (25/5/2025).

"Saat ini Tiongkok adalah mitra dagang kita yang terbesar," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi perusahaan-perusahaan Cina dalam pembangunan industri dan teknologi Indonesia.

Beberapa proyek besar, di antaranya adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pengembangan kawasan industri, dan hilirisasi nikel yang dinilai berhasil memperkuat fondasi ekonomi nasional.

"Hubungan dagang investasi dan teknologi ini adalah bukti komitmen kita bersama untuk membangun masa depan yang lebih kuat, sejahtera, dan ramah lingkungan bagi

kedua bangsa kita," kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan rasa terima kasih atas partisipasi mereka dalam penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pembangunan kepercayaan di dunia usaha Indonesia.

"Saya telah berjumpa dengan banyak tokoh-tokoh dari dunia usaha Tiongkok. Saya melihat komitmen mereka, saya melihat keinginan mereka untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi di Indonesia. Mereka sangat terbuka untuk mendengarkan kepentingan-kepentingan kita," katanya. (wid,rls,ant/dya)

RISIKO TINGGI PUNCAK HAJI, JAMAHAH DIIMBAU SELALU BERSAMA ROMBONGAN

Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau jamaah haji agar senantiasa bersama dengan rombongan dalam melaksanakan ibadah, terutama di sepanjang puncak haji. Pasalnya risiko akan tinggi saat kepadatan jamaah meningkat.



Petugas Pelindungan Jamaah dan Media Center Haji mengecek jalur pergerakan jamaah calon haji Indonesia dari tenda menuju jamarat di Mina, Makkah, Minggu (25/5/2025). (ist.MCH)

Menjelang puncak ibadah Haji 2025 atau 1446 Hijriah yang diperkirakan berlangsung pada awal Juni, pemerintah mengimbau jamaah haji Indonesia untuk tidak beraktivitas sendiri.

"Hindari beraktivitas sendirian, apalagi saat keluar hotel. Usahakan selalu bersama rombongan atau teman sekamar. Ini untuk menghindari risiko tersesat dan jamaah bisa saling menjaga," kata Kepala Bidang Perlindungan Jamaah (Linjam) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Harun Arrasyid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Selain itu, Harun juga menyampaikan sejumlah imbauan lainnya. Di antaranya adalah agar jamaah, terutama jamaah perempuan untuk tidak beraktivitas di hotel sendirian.

"Diimbau tidak naik lift atau menjemur pakaian sendirian. Minta pendampingan satu atau dua orang untuk memastikan keamanan," kata dia.

Selanjutnya, jangan sembarangan membuka pintu kamar hotel. Jika ada yang mengetuk pintu, jamaah harus memastikan mengenal orang tersebut.

"Jangan pernah membuka pintu untuk orang asing, sekalipun mengaku sesama jamaah," ujarnya.

Berikutnya, jamaah juga tidak menaiki taksi sendirian. Mereka, terutama calon haji perempuan, harus didampingi mahram atau teman laki-laki.

"Naik taksi, sebaiknya laki-laki masuk lebih dulu dan perempuan keluar lebih dulu. Tanyakan tarif di awal dan, bila memungkinkan, bayar di awal perjalanan," ujar Harun menambahkan.

Kemudian apabila tersesat di Masjidil Haram, jamaah dapat mendatangi pos sektor khusus yang telah ditempatkan PPIH di sembilan titik strategis masjid, yakni Syib Amir, Pintu keluar Marwah, Area Sai, Area

Thawaf, Pintu Babussalam, WC 3, depan ATM Darut Tauhid, Arah Hotel Anjum, dan Terminal Jabal Kakbah.

"Petugas siap membantu mengarahkan jamaah kembali ke terminal dan naik bus menuju hotel," kata dia.

Kemudian, jamaah juga diimbau menghafalkan rute Bus Shalawat serta selalu membawa Kartu Nusak atau identitas. PPIH, kata Harun, terus berkomitmen memberikan perlindungan dan layanan terbaik bagi jamaah.

Batasi Aktivitas Berat

Jamaah juga harus mulai membatasi aktivitas fisik berat yang tak diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan diri menghadapi wukuf di Padang Arafah.

"Masih ada sekitar dua pekan

sebelum puncak haji. Gunakan waktu ini untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya," kata Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Akhmad Fauzin, dikutip dari keterangan resmi Kemenag.

Fauzin juga mengingatkan kondisi cuaca di Makkah yang diperkirakan mencapai 45 hingga 50 derajat Celsius saat puncak haji. Karena itu, ia menyarankan jamaah melaksanakan salat fardu di masjid hotel jika dirasa tubuh tidak cukup kuat untuk ke Masjidil Haram.

Biasanya, jamaah haji berusaha melaksanakan salat arbain (salat berjamaah 40 waktu) di Masjid Nabawi secara lengkap. Nmaun, jangan memaksakan diri jika suhu udara tinggi dan gejala dehidrasi mulai terasa.

Langgar Standar Keamanan Nasional, Saudi Tutup 44 Gudang

BADAN Pangan dan Obat Saudi (SFDA) terus melaksanakan kampanye inspeksi proaktif sebagai bagian dari persiapan intensif untuk musim Haji 1446 H, termasuk menutup 44 gudang yang melanggar standar keamanan.

Badan tersebut, sebagaimana dilaporkan SPA pada Ahad, telah melakukan lebih dari 1.329 kunjungan lapangan ke gudang makanan, obat-obatan, dan peralatan medis di Makkah dan Madinah.

Inspeksi dan upaya peningkatan kesadaran yang berkelanjutan itu telah berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan yang signifikan di antara fasilitas-fasilitas

penyimpanan makanan dan obat-obatan yang ditujukan bagi para jamaah haji.

Selama kunjungan tersebut, tim inspeksi mengidentifikasi sejumlah gudang yang melanggar persyaratan teknis yang telah disetujui, dan tindakan hukum yang diperlukan langsung diambil. Akibatnya, sebanyak 44 gudang ditutup dan 349 pelanggaran tercatat.

Untuk meningkatkan kesadaran, SFDA meluncurkan kampanye multibahasa yang mencakup pendistribusian brosur yang berisi pedoman penting terkait penanganan produk. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kepatuhan di

"Jamaah haji Indonesia membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai di kota Makkah. Belum lagi proses pembagian kamar yang lama membuat jamaah semakin kelelahan. Bila begini, segeralah beristirahat yang cukup setelah sampai di penginapan," katanya.

Tingginya suhu udara bisa mengakibatkan dehidrasi. Ini bisa dicegah dengan memperbanyak minum air putih. "Masjid biasanya menyediakan tempat penampungan minum, sehingga bisa membantu."

Jamaah diminta perhatikan warna urin. Jika warnanya keruh, itu bisa menjadi tanda tubuh membutuhkan lebih banyak air. Selain itu, diminta hindari minuman berkafein atau bersoda karena bisa memperparah dehidrasi. (wid,rls,ant/dya)

IMBAUAN BAGI JAMAHAH HAJI

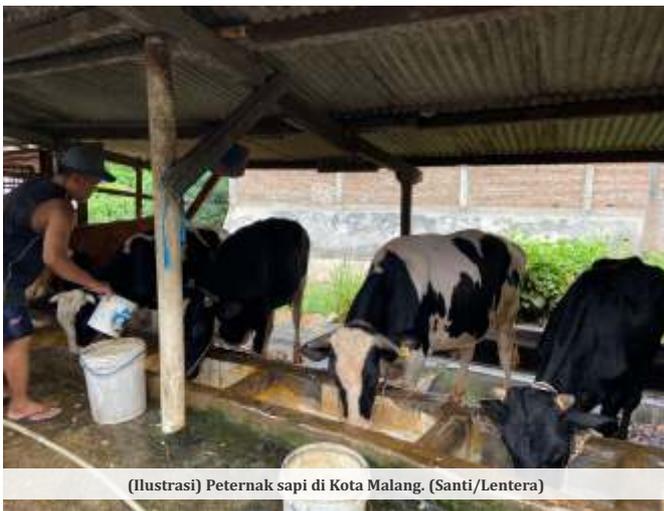
- Hindari aktivitas di luar ruangan saat matahari terik atau pukul 10.00-16.00 waktu Arab Saudi.
- Gunakan masker saat berada di luar ruangan atau tempat ramai.
- Konsumsi air putih secara berkala, 200 ml per jam atau minimal 2 liter/hari.
- Istirahat cukup dan hindari aktivitas fisik berlebihan.
- Segera periksa kedokter kloter atau klinik kesehatan haji jika mengalami gejala ISPA.

seluruh fasilitas yang melayani jamaah haji.

SFDA mengintensifkan upayanya setiap musim haji karena peran pentingnya dalam memastikan bahwa makanan, obat-obatan, dan produk medis memenuhi standar keselamatan nasional.

Upaya tersebut dinilai sangat penting untuk meminimalkan risiko kesehatan dan menjamin kesejahteraan para jamaah haji di tanah suci. (wid,spa-oana,ant/dya)

Pastikan Nihil PMK, 600 Dosis Vaksin Sudah Disuntikkan ke Ternak di Kota Malang



(Ilustrasi) Peternak sapi di Kota Malang. (Santi/Lentera)

MALANG- Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 H, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang memastikan nihil kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sebagai antisipasi, 600 dosis vaksin juga telah disuntikkan ke ternak sejak

awal tahun 2025.

"Alhamdulillah per hari ini nihil PMK. Karena mulai awal tahun juga sudah kami lakukan vaksinasi dan pengobatan kepada ternak yang terindikasi," ujar Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, Minggu (25/5/2025).

Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispangtan Kota Malang, Anton Pramujiyono, menambahkan hingga saat ini, Pemkot Malang masih memiliki stok 600 dosis vaksin. Menurutnya, ratusan dosis tersebut akan digunakan untuk vaksinasi pengulangan dan booster

setelah Idul Adha.

"Rencana vaksinasi tahap kedua akan dilakukan pasca-Idul Adha, sebab sebagian besar ternak akan dipotong dan dilakukan pendataan ulang untuk mengetahui jumlah hewan yang masih tersisa di peternakan maupun lapak penjualan," ungkap Anton.

Ditegaskannya, waktu vaksinasi ideal dilakukan sebulan sebelum hewan disembelih. Sebab, kekebalan tubuh pascavaksinasi baru terbentuk dalam waktu 4 hingga 7 hari. Karena itu, vaksinasi yang dilakukan terlalu mepet menjelang penyembelihan dinilai kurang efektif.

Di sisi lain, terkait pemeriksaan kesehatan hewan kurban, Dispangtan juga menerapkan dua tahap pemeriksaan, yakni ante mortem (sebelum disembelih) dan post mortem (setelah disembelih). Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada parasit atau penyakit berbahaya dalam tubuh hewan kurban.

"Kalau pemeriksaan ante mortem

itu kita lihat apakah hewannya sehat, layak dipotong. Tapi setelah dipotong, kami tetap periksa organ dalamnya karena kadang masih ditemukan cacing hati atau bahkan eksudat bernanah di paru-paru," terangnya.

Anton menyebutkan, cacing hati masih sering ditemukan karena sifat endemis di wilayah Kota Malang. Beberapa peternak dinilai belum optimal dalam memberikan pengobatan antiparasit, sehingga infeksi tetap muncul meski tidak membahayakan secara luas.

Sementara itu, nanah di paru-paru bisa mengindikasikan adanya bakteri penyebab TBC pada sapi yang berpotensi menular ke manusia.

Kendati demikian, pihaknya memastikan hewan yang dinyatakan sehat oleh tim pemeriksa akan diberi tanda form keterangan sehat. Ini sekaligus menjadi acuan bagi juru sembelih hewan (juleha) saat menjalankan tugas di hari H Idul Adha. (Santi/Dya)

673 Kasus DBD/Mei 2025, Dibanding Fogging Dinkes Kabupaten Malang Prioritaskan PSN

MALANG- Jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Malang mencapai 673 kasus per Mei 2025. Meski masyarakat kerap meminta fogging sebagai respons cepat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang menegaskan pengasapan bukan langkah utama.

Plt Kepala Dinkes Kabupaten Malang, Ivan Drie, mengatakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) justru menjadi prioritas, karena dinilai lebih efektif dalam memutus siklus penularan.

"DBD ini sesuai dengan siklus cuaca. Secara nasional memang ada peningkatan. Di Kabupaten Malang sendiri, sampai Mei 2025 tercatat ada 673 kasus," ujar Ivan, Minggu (25/5/2025).

Disebutkannya, angka tersebut masih berpotensi terus bertambah jika tidak diimbangi dengan upaya pencegahan secara menyeluruh. Karena itu, PSN menjadi langkah krusial yang harus dijalankan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

Menurut Ivan, sejak Januari 2025 lalu, Kementerian Kesehatan telah

mengeluarkan surat edaran (SE) yang menekankan pentingnya PSN. Edaran tersebut juga telah ditindaklanjuti Dinkes Kabupaten Malang melalui imbauan resmi kepada seluruh camat, lurah, dan kepala desa agar mengintensifkan gerakan bersih-bersih lingkungan.

"Masyarakat masih banyak yang salah mengerti. Kalau ada yang sakit DBD, maunya langsung fogging. Padahal fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Sumber utamanya tetap dari sarang nyamuk dan jentiknya," jelas Ivan.

Ivan menambahkan, fogging juga tidak dapat dilakukan sembarangan. Terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang wajib dipenuhi sebelum tindakan fogging dijalankan. Salah satunya adalah hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan pasien di suatu wilayah positif DBD, disertai dengan penyelidikan epidemiologi di wilayah sekitarnya.

"Kalau Dinkes dianggap lambat dalam fogging, sebenarnya bukan soal lambat. Tapi memang ada prosedur yang harus dilalui. Tidak bisa langsung

fogging begitu saja," tegasnya.

Ivan menjelaskan, penyelidikan epidemiologi akan menentukan apakah suatu wilayah termasuk kategori endemis DBD atau tidak. Salah satu indikatornya adalah keberadaan lebih dari satu kasus dalam radius 100-200 meter dan ditemukannya larva nyamuk di sekitar lokasi tersebut.

"Kalau salah satu syaratnya itu belum terpenuhi, ya statusnya masih negatif. Jadi upaya PSN yang harus dikuatkan. Itu yang harus dipahami bersama," katanya.

Lebih lanjut, disinggung terkait kemungkinan adanya kasus kematian akibat DBD, Ivan menyebut pihaknya masih melakukan penelusuran dan pendalaman data. Meski demikian, pihaknya mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan



(Ilustrasi) Pemberantasan Sarang Nyamuk. (dok. Istimewa)

sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh.

Selain gerakan PSN, Ivan juga mengimbau masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh melalui pola hidup sehat. Ia menyarankan agar warga cukup istirahat, mengonsumsi makanan bergizi, minum air putih dalam jumlah cukup, serta bila perlu menambah asupan vitamin dan mineral terutama bagi yang memiliki aktivitas tinggi. (Santi/Dya)



Momen ketika Ayman Odeh dikeluarkan dari Parlemen Israel, Knesset, Rabu (21/05/2025)
(Ayman Odeh/Twitter)

POLITIKUS ISRAEL **DISERET** **DARI PODIUM SAAT BICARA** **KEBENARAN SOAL GAZA**

Seorang politikus oposisi Israel, Ayman Odeh dikeluarkan secara paksa dari podium ruang parlemen usai menyampaikan kondisi Gaza, Palestina. Ayman memaparkan korban perang Gaza yang mencapai puluhan ribu.

"Mereka menyeret saya keluar dari podium Parlemen, bukan karena melanggar aturan, tetapi karena mengatakan kebenaran," katanya.

Ayman lantas mengingatkan kembali akan tragedi Nakba. Menurutnya, tragedi itu terulang lagi di Gaza.

"Tujuh puluh tujuh tahun setelah Nakba, dunia menyaksikan Nakba kedua terjadi di Gaza," lanjutnya.

Sementara itu, dalam pembaruan terkini, sedikitnya 60 orang tewas akibat serangan Israel di Gaza dalam kurun waktu 24 jam, kata kementerian kesehatan Gaza, Jumat (23/5/2025).

Korban tewas termasuk 10 orang di kota selatan Khan Younis, empat di kota tengah Deir al-Balah dan sembilan di kamp pengungsi Jabaliya di utara, menurut rumah sakit Nasser, Al-Aqsa dan Al-Ahli tempat jenazah dibawa.

Di tengah perang yang sedang berlangsung, Israel telah memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza selama hampir tiga bulan, yang memicu kekhawatiran dari para pengamat internasional. Para ahli memperingatkan bahwa sebagian besar penduduk Gaza—lebih dari 2

juta orang—kini berisiko tinggi mengalami kelaparan.

Bahkan Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, telah menyatakan kekhawatirannya atas meningkatnya krisis kelaparan.

Gelombang serangan udara terbaru, yang berlanjut hingga Jumat pagi, menyusul serangan mematikan terhadap sebuah rumah sakit di Gaza utara. Tank dan pesawat nirawak Israel dilaporkan menargetkan fasilitas tersebut, memicu kebakaran dan menyebabkan kerusakan besar.

Israel bersikeras serangannya akan terus berlanjut hingga Hamas membebaskan seluruh 58 sandera Israel yang tersisa dan dilucuti serjatanya sepenuhnya. (DW News, The Guardian, ist/nei)

Dikutip dari DW News dan The Guardian, Minggu (25/5/2025) Ayman Odeh adalah anggota partai gabungan Arab-Yahudi, Hadash. Pada Kamis (22/5/2025), ia menyampaikan pandangannya terkait situasi di Gaza, sambil mengkritik para anggota parlemen yang dinilai tidak tegas dalam menyikapi konflik tersebut.

"Hal lain yang ingin saya katakan, Anda tidak tahu betapa lemahnya Anda. Anda adalah orang-orang yang lemah. Sangat, sangat lemah," ujar Ayman.

Dia menyoroti korban perang Gaza yang mencapai puluhan ribu orang. Selain itu, dia mengungkap bahwa perang ini juga menghancurkan kampus hingga rumah sakit.

"Setelah satu setengah tahun perang di mana Anda membunuh 19.000 anak-anak. 53.000 penduduk. Anda menghancurkan semua universitas, dan rumah sakit, Anda merasa tidak ada kemenangan politik, itulah sebabnya Anda menjadi gila," tegasnya.

Ayman mengatakan bahwa parlemen lemah. Sebab, tak ada kemenangan politik dalam hal ini. "Mengapa? Karena tidak ada kemenangan politik," ungkapinya.

Petugas keamanan lantas naik ke podium. Mereka menarik Ayman keluar ruang parlemen.

Ayman menyatakan dalam akun X miliknya, bahwa tindakan penarikan paksa itu melanggar aturan. Padahal, Ayman sedang berbicara tentang kebenaran di Gaza.

Jumlah Korban Tewas Tembus 53.900 Orang

Seorang penyelamat berjalan di atas reruntuhan untuk menilai kerusakan dan mencari korban selamat, di Khan Younis, Gaza, Jumat (23/5/2025), dalam tangkapan layar yang diambil dari video. (Pertahanan Sipil Palestina/REUTERS)



SETIDAKNYA 53.901 warga Palestina telah tewas dalam genosida Israel sejak Oktober 2023, kata Kementerian Kesehatan Gaza dikutip pada Minggu (25/5/2025).

Dalam pernyataannya, kementerian mengungkapkan bahwa 79 jenazah tiba di rumah sakit dalam 24 jam terakhir, disertai 211 korban luka. Total jumlah orang yang terluka akibat serangan intensif Israel kini mencapai 122.593.

"Banyak korban masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalan karena tim penyelamat tidak dapat menjangkau mereka."

Di antara para korban tewas, terdapat 9 dari 10 anak dr. Alaa Al-

Najjar, yang bertugas di Kompleks Medis Nasser di Khan Younis. Suaminya, Dr. Hamdi Al-Najjar, terluka parah. suaminya,

Satu-satunya anak pasangan dokter yang selamat, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun, terluka parah dan menjalani operasi darurat pada Jumat.

Rekamannya mengerikan yang dibagikan oleh Pertahanan Sipil Palestina, dan diverifikasi oleh media

termasuk BBC, menunjukkan jenazah anak-anak kecil yang ditarik dari reruntuhan bangunan yang runtuh di dekat pom bensin di Khan Younis.

Dokter bedah Inggris Dr. Graeme Groom, yang menjadi relawan di rumah sakit Nasser, mengatakan putra Dr. Al-Najjar yang selamat adalah pasien terakhirnya hari itu.

"Dia terluka sangat parah dan tampak jauh lebih muda saat kami mengangkatnya ke meja operasi," katanya dalam sebuah video yang diunggah di media sosial.

PBB telah memperingatkan bahwa Gaza mungkin memasuki

"fase paling kejam" dalam perang tersebut, dengan Sekjen PBB Antonio Guterres mengancam pembatasan bantuan Israel yang memperburuk bencana kemanusiaan.

Meskipun Israel mencabut blokadnya sebagian minggu ini, sehingga hanya mengizinkan masuknya bantuan dalam jumlah terbatas, PBB mengatakan pengiriman tersebut jauh dari 500-600 truk pasokan yang dibutuhkan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi 2,1 juta penduduk wilayah tersebut.

Tentara Israel melanjutkan serangannya di Jalur Gaza pada 18 Maret dan sejak itu telah menewaskan 3.747 orang dan melukai hampir 10.600 lainnya. Serangan ini menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan yang berlaku pada bulan Januari.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perangnya di daerah kantong tersebut. (Anadolu, ist/nei)

Pisahkan Talenan, Hindari Bakteri Berbahaya

Kontaminasi silang adalah masalah kesehatan yang kerap muncul di dapur. Walau terlihat sepele, menggunakan satu talenan untuk memotong daging dan sayur bisa menjadi pemicu utama penyebaran bakteri berbahaya seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria. Karena itu, memisahkan talenan untuk masing-masing bahan makanan merupakan langkah sederhana namun krusial demi menjaga kebersihan serta melindungi kesehatan keluarga.

Penggunaan talenan yang sama untuk memotong bahan makanan mentah seperti daging, ikan, unggas, dan sayuran tanpa mencucinya dengan bersih terlebih dahulu dapat meningkatkan risiko kontaminasi silang mikrobiologi secara signifikan. Menurut situs food.gov.uk, hal ini diungkap dalam tinjauan literatur yang menjadi bagian dari proyek Kitchen Life 2 (KL2), yang meneliti kebiasaan penggunaan talenan di kalangan rumah tangga dan pelaku usaha makanan (Food Business Operators/FBO).

Tinjauan literatur menemukan bahwa 50% rumah tangga melaporkan tidak menggunakan atau jarang menggunakan talenan khusus untuk persiapan daging mentah. Ketika hanya satu talenan yang digunakan, sering kali talenan tersebut tidak didesinfeksi dengan benar, seperti mencuci dengan sabun dan mengeringkannya.

Dalam sebuah studi tentang kontaminasi mikroba di dapur FBO, talenan ditemukan memiliki beban mikroba tertinggi dibandingkan

dengan permukaan lain di dapur.

Bahaya Kontaminasi Silang

Kontaminasi silang terjadi ketika bakteri atau mikroorganisme dari bahan makanan mentah, terutama daging, berpindah ke bahan makanan lain seperti sayuran atau buah-buahan. Proses ini sering kali terjadi karena penggunaan alat masak yang sama tanpa dicuci bersih, termasuk talenan.

Daging mentah, khususnya daging ayam dan sapi, mengandung bakteri yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan jika masuk ke tubuh manusia. Jika sayur atau buah yang akan dimakan mentah terkena bakteri dari talenan yang digunakan untuk daging, risiko keracunan makanan meningkat secara signifikan.

Sementara itu ada beberapa alasan kenapa harus memisahkan talenan sebagai berikut:

Mencegah Penyebaran Bakteri

Talenan untuk daging mentah sering kali terkontaminasi oleh cairan atau darah dari daging tersebut. Dengan menggunakan talenan terpisah, Sahabat Fimela dapat mencegah bakteri berpindah ke bahan makanan lain.

Melindungi Nutrisi Sayuran

Sayur dan buah segar yang biasanya dikonsumsi tanpa dimasak dapat kehilangan manfaat nutrisinya jika terkontaminasi bakteri. Bahkan jika sayur dimasak, beberapa bakteri mungkin tidak sepenuhnya mati jika

tidak dimasak pada suhu tinggi.

Mempermudah Kebersihan Dapur

Dengan memisahkan talenan, Sahabat Fimela lebih mudah menjaga kebersihan dapur. Talenan untuk daging dapat langsung dicuci dengan sabun antibakteri setelah digunakan tanpa mengganggu persiapan bahan lain.

Siapa yang berisiko mengalami kontaminasi silang?

Kontaminasi silang bisa menyebabkan penyakit bawaan makanan. Menurut data WHO gangguan ini memengaruhi 600 juta orang di seluruh dunia per tahunnya. Bahkan, dari angka tersebut ada sekitar 420.000 orang meninggal dunia setiap tahun setelah makan makanan yang terkontaminasi.

Pada dasarnya, setiap orang berisiko terkena kontaminasi silang. Namun, terdapat kelompok orang tertentu memiliki risiko lebih tinggi, meliputi: ibu hamil, anak-anak di bawah usia 5 tahun, orang dewasa di atas usia 65 tahun, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah, seperti orang dengan HIV/AIDS, diabetes, atau kanker. Melihat fakta di atas, tentu sangat penting untuk mengetahui jenis-jenis dan cara pencegahan kontaminasi silang yang dapat Anda lakukan.

Terdapat tiga jenis kontaminasi silang yang umum terjadi, yakni dari makanan ke makanan, peralatan ke makanan, dan orang ke makanan.

Makanan ke makanan

Makanan yang terkontaminasi, seperti makanan mentah, setengah matang, atau tidak dicuci dengan benar, bisa mencemari makanan lain yang tidak terkontaminasi.

Jenis makanan tersebut menampung berbagai bakteri, seperti Salmonella, Escherichia coli, dan Listeria monocytogenes, yang berbahaya bagi kesehatan.

Penyimpanan daging mentah di rak paling atas lemari es yang menyebabkan tetesan daging ke sayuran atau makanan siap saji yang ditempatkan di rak bawah. Sisa makanan yang disimpan terlalu lama di lemari es memicu

pertumbuhan bakteri berlebihan yang mencemari bahan makanan lainnya. Sayuran yang tidak dicuci bersih dan terkontaminasi ditambahkan ke hidangan sayuran segar.

Peralatan ke makanan

Jenis kontaminasi ini umumnya terjadi karena peralatan memasak tidak dibersihkan dengan benar dan langsung digunakan untuk mengolah bahan makanan lainnya. Bakteri yang memicu keracunan makanan bisa bertahan lama pada meja, talenan, pisau, wadah penyimpanan, bahkan peralatan pabrik untuk mengolah makanan.

Menggunakan peralatan yang tidak bersih dan steril, seperti pisau, sendok, garpu, atau pembuka kaleng untuk menyiapkan makanan. Memakai talenan dan pisau yang sama saat memotong bahan makanan yang berbeda, seperti memotong ayam mentah dan sayuran untuk salad.

Orang ke makanan

Orang yang mengolah bahan makanan juga bisa dengan mudah menjadi sumber kontaminasi silang terhadap makanan. Mikroorganisme berbahaya bisa berasal dari dalam tubuh yang sakit atau berasal dari benda di sekitar, seperti pakaian atau ponsel yang tidak bersih.

Mengolah bahan makanan setelah menggunakan toilet tanpa terlebih dahulu mencuci tangan dengan benar. Menyentuh daging mentah dan kemudian menyiapkan sayuran tanpa mencuci tangan terlebih dahulu sebelumnya. (nei,ist/dya)

Tips Memilih dan Merawat Talenan

-Gunakan Warna yang Berbeda:

Pilih talenan dengan warna berbeda untuk daging dan sayur, misalnya merah untuk daging dan hijau untuk sayur.

-Pilih Bahan yang Tepat:

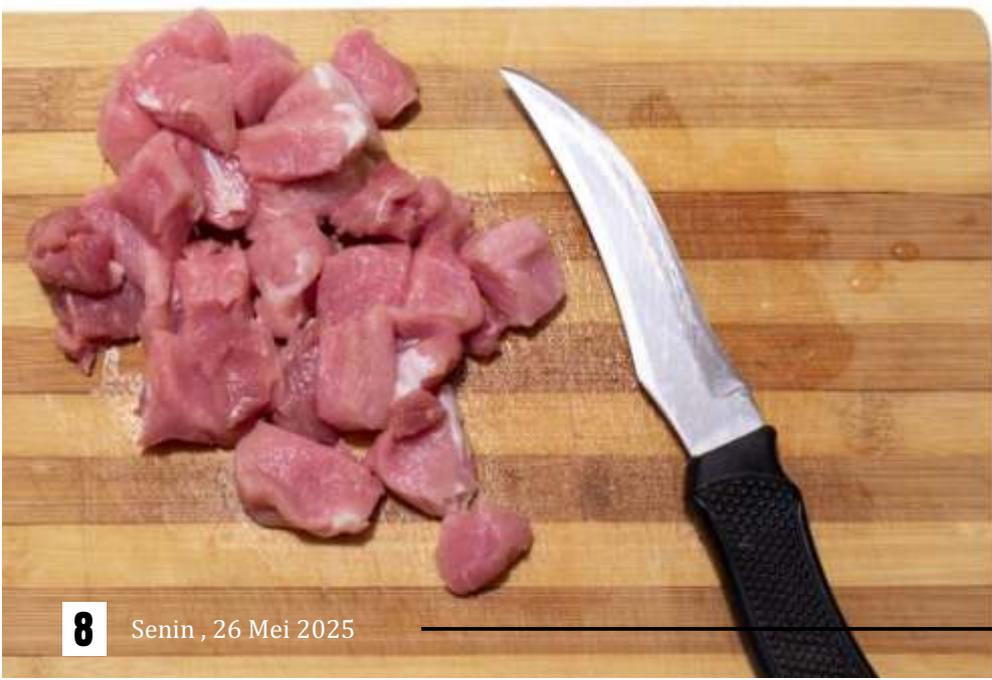
Talenan plastik atau kaca lebih mudah dibersihkan dibandingkan kayu, terutama untuk memotong daging.

-Cuci dengan Benar:

Setelah digunakan, cuci talenan dengan air panas dan sabun antibakteri. Sahabat Fimela juga dapat menggunakan larutan cuka atau cairan pemutih untuk desinfeksi.

-Ganti Secara Berkala:

Talenan yang sudah aus atau memiliki banyak goresan sebaiknya diganti, karena goresan tersebut dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri.



UGM-Telkom Kembangkan Teknologi Deteksi Gempa Megathrust



(Sumber: ugm.ac.id)

Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama PT Telkom Indonesia menjalin kerja sama untuk mengembangkan sistem peringatan dini gempa bumi menggunakan teknologi Distributed Acoustic Sensing atau Penginderaan Akustik Terdistribusi.

"Nanti ya tanggal 5 Juni akan diberlakukan dan akan dirapatkan kembali. Dan itu di bawah 1.300 KWh," ujar Airlangga singkat di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (25/5/2025).

Walau begitu, Airlangga belum merinci skema lengkap insentif pemotongan tarif listrik tersebut. Airlangga mengamini bahwa poin-poinnya dari skema tersebut akan di-breakdown pada 5 Juni nanti.

"Ya [di-breakdown pada 5 Juni nanti]," kata Airlangga. Dia mengungkap alasan pelanggan listrik PLN dengan daya 2.200 VA tak lagi masuk daftar penerima diskon. Padahal

dalam paket stimulus sebelumnya pada awal tahun, pelanggan dengan daya tersebut termasuk yang mendapat manfaat.

"Ya dari evaluasi kemarin, kita mau masyarakat yang di bawah," ujar Airlangga. Pemerintah kembali menghadirkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama Juni-Juli 2025 untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA. Keringanan ini sebagai salah satu dari 6 paket insentif atau stimulus ekonomi kuartal II 2025.

Airlangga Hartarto mengatakan tujuan dari pemberian insentif tersebut untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 berada di kisaran 5 persen.

"Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya

untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi," ujar Airlangga.

Sekadar informasi, Pemerintah akan mengguyur enam paket insentif ekonomi pada 5 Juni 2025, demi mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2025 dan kuartal III/2025. Enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut yaitu diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Sejauh ini untuk diskon tarif listrik, skemanya sama seperti pada Januari dan Februari lalu. Hanya saja, jika pada Januari—Februari 2025 yang berhak menerima manfaat adalah pelanggan PLN dengan daya hingga 2.200 VA maka kini yang akan menerima hanya pelanggan dengan di bawah 1.300 VA.

Bantuan Upah Karyawan dan Guru Honorar

Tak hanya itu, pemerintah juga akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja mulai 5 Juni 2025. Bantuan tunai ini ditujukan kepada guru honorar dan karyawan dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta atau setara Upah Minimum Provinsi (UMP).

BSU merupakan salah satu dari enam paket insentif yang tengah dipersiapkan

pemerintah untuk mendukung daya beli masyarakat. "BSU, kemudian ada bantuan-bantuan untuk menunjang daya beli, itu sedang dipersiapkan. Nanti akan diberlakukan per 5 Juni," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Program serupa sebelumnya telah disalurkan pada 2022 sebagai respons terhadap dampak ekonomi pandemi Covid-19. Saat itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan penyaluran BSU se-nilai Rp 600.000 sekali bayar kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta.

Namun, menurut Airlangga, nilai BSU tahun ini lebih kecil. "Tidak, tidak segitu (nilainya). Lebih kecil," katanya. Ia menambahkan pemerintah telah menghitung perkiraan total anggaran yang dibutuhkan, namun jumlah pastinya belum diumumkan karena masih dalam tahap finalisasi.

Rincian kriteria penerima manfaat dan syarat-syaratnya juga sedang dirampungkan. "Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya," tambah Airlangga. (wid,rls,ant,kum/dya)



(Sumber: ugm.ac.id)



HARIAN **LENTERA**
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Perempuan Kesepian Lebih Suka Makanan Manis

Kesepian bisa terasa menyakitkan karena munculnya rasa seolah tak ada yang mendampingi. Ketika seseorang merasa terisolasi dalam kesepian, mereka cenderung mencari cara untuk menghibur diri, salah satunya melalui konsumsi makanan.

Sebuah studi dari University of California, Amerika Serikat, pada tahun 2024 mengungkap bahwa perempuan yang mengalami kesepian menunjukkan peningkatan aktivitas otak di area yang berhubungan dengan hasrat dan dorongan makan. Responden ini cenderung lebih kuat ketika mereka melihat gambar makanan tinggi kalori, terutama makanan manis.

Dikutip dari Scitech, perempuan yang sedang kesepian menunjukkan kebiasaan makan yang tidak sehat dengan cenderung mengonsumsi makanan manis. Tak hanya itu, mereka juga memiliki kondisi kesehatan mental yang buruk.

Salah satu peneliti di studi tersebut, Arpana Gupta, Ph.D, menyebutkan bahwa obesitas memiliki keterkaitan dengan depresi dan kecemasan. Sementara, makan berlebihan merupakan mekanisme penanggulangan terhadap kesepian pada beberapa orang.

“Saat orang sendirian atau kesepian, hal itu memengaruhi lebih dari sekadar perasaan mereka, mereka tidak melaporkan apa yang mereka makan, tapi keinginan mereka untuk makan terutama untuk jenis makanan yang tidak sehat,” ungkap Arpana.

Para peneliti mensurvei 93 perempuan tentang sistem pendukung mereka, perasaan kesepian, serta keterasingan mereka. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa perempuan yang dengan perasaan keterasingan sosial lebih tinggi

cenderung memiliki massa lemak yang lebih tinggi pula.

Mereka juga memiliki kualitas diet yang lebih rendah dengan keinginan makan lebih besar. Kebiasaan makan mereka yang tidak terkontrol selaras dengan tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi karena perasaan terisolasi alias kesepian.

Responden kemudian diperlihatkan gambar makanan dan non-makanan, lalu jenis makanan manis dan non-makanan, serta makanan gurih dan non-makanan. Pemindaian MRI yang dilakukan merekam aktivitas otak para peserta yang merasa kesepian memiliki keinginan besar untuk mengonsumsi makanan manis. Mereka juga mengalami penurunan aktivasi di wilayah otak yang terkait dengan pengendalian diri terhadap perilaku makan.

Menurut peneliti lainnya, Xiaobei Zhang, mengatakan bahwa perilaku ini merupakan lingkaran setan antara gejala kesehatan mental yang negatif dan pola makan yang tidak sehat. “Jika Anda memiliki lebih banyak keinginan untuk makan, Anda kemungkinan juga mengalami lebih banyak kecemasan atau depresi,” imbuh Xiaobei.

Mengapa Perempuan Lebih Rentan?

Dalam konteks ini, perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan. Banyak faktor yang berkontribusi, mulai dari perubahan hormon, tekanan sosial

hingga peran gender yang sering menempatkan perempuan dalam situasi emosional yang kompleks.

Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa perempuan lebih mungkin mengasosiasikan makanan manis dengan kenyamanan emosional dibanding laki-laki.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius dalam isu kesehatan publik, mengingat kesepian menjadi masalah yang kian marak, terlebih di era pasca pandemi dan gaya hidup serba digital yang membuat interaksi sosial menjadi minim.

Sementara menjaga kesehatan mental dan fisik secara bersamaan bukanlah hal mudah, namun bisa dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Berikut beberapa saran dari ahli gizi dan psikolog untuk menghindari konsumsi berlebih makanan manis akibat kesepian:

Sadari Emosi Anda

Coba tanyakan pada diri sendiri sebelum makan: “Apakah saya benar-benar lapar atau hanya sedang merasa kesepian atau stres?”

Cari Pengalihan Sehat

Mengalihkan perhatian dari keinginan makan manis ke aktivitas seperti berjalan kaki, berbicara dengan teman, atau mendengarkan musik bisa membantu meredakan keinginan tersebut.

Simpan Camilan Sehat

Jika ingin ngemil, siapkan alternatif yang lebih sehat seperti buah segar, yoghurt rendah lemak, atau kacang-kacangan.

Jaga Koneksi Sosial

Berupaya membangun atau mempertahankan hubungan sosial secara rutin, baik secara langsung maupun virtual, terbukti dapat mengurangi rasa kesepian.

Makanan Manis Sebabkan Obesitas & Kematian

Ladies, perilaku makan menjadi salah satu kunci kesehatan tubuh kita. Kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak sehat, termasuk yang tinggi gula dapat menimbulkan masalah berat badan seperti obesitas. Tak berhenti di sana, obesitas juga berkontribusi terhadap risiko banyak penyakit kronis di masa depan.

Psikolog di National Opinion Research Center, University of Chicago, Louise Hawkley menyebut bahwa ada korelasi antara perasaan kesepian, kebiasaan makan, dan obesitas terhadap meningkatnya risiko kematian dini.

“Kesepian lebih terkait dengan kualitas hubungan yang buruk dengan orang sekitar, sehingga menyebabkan stres atau konflik. Jika kamu merasa kesepian hingga kewalahan dengan apa yang harus dilakukan, mulailah dengan hal sederhana seperti menelepon teman atau mengirim pesan teks,” ujar Louise.

Mengonsumsi makanan manis sesekali tentu tidak salah, bahkan bisa membantu meredakan stres dalam kadar tertentu. Namun, penting untuk tetap membatasi porsi dan menyadari kondisi emosional yang memicu keinginan tersebut. (nei,ist/dya)



Copot Menkes (dari Hal 1)...

Kesehatan merupakan satu dari enam layanan dasar yang wajib mendapat prioritas. Sehingga menteri di bidang tersebut tentu akan mendapat sorotan dalam setiap langkah dan ucapannya.

Di antaranya Menkes Budi menyebutkan lingkaran pinggang di atas 32 cm bakal cepat bertemu Tuhan dan orang dengan gaji Rp5 juta tidak pintar.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Zainul Munasichin meminta Menkes Budi tidak membuat gaduh publik dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya. Ia berharap Menkes Budi untuk lebih fokus pada peningkatan kinerja dan menyelesaikan berbagai persoalan Kesehatan.

"Pernyataan itu tidak penting dan tidak seharusnya disampaikan Menteri Kesehatan," kata Zainul kepada wartawan, Minggu (25/5/2025).

Menurutnya, pernyataan itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Terkait orang yang bergaji Rp15 juta juga tidak menjamin lebih sehat dari orang yang berpenghasilan Rp5 juta.

Banyak orang yang bergaji lebih kecil, tapi lebih sehat dibanding orang yang memiliki penghasilan lebih besar. Jadi, orang yang bergaji besar tidak menjamin lebih sehat.

"Mungkin orang yang bergaji besar lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan yang bagus, tapi tidak menjamin lebih sehat. Coba lihat masyarakat yang hidup desa banyak mereka yang kondisinya sehat, walaupun penghasilannya kecil," kata Zainul.

Begitu juga soal kepintaran, Zainul mengatakan, tidak semua orang yang pintar itu bergaji besar. Karena banyak orang yang pintar secara akademik, tapi penghasilan mereka rendah.

Apalagi dalam kondisi sekarang ini dimana banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga sulit mencari kerja.

Sebaliknya, ada orang yang biasa saja dalam kepintaran akademik, tapi mereka bisa menjadi orang kaya dengan penghasilan besar. Banyak orang yang biasa saja dalam akademik, tapi mereka menjadi pengusaha.

"Jadi apa yang dikatakan Menkes Budi itu tidak tepat. Fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda," tutup Zainul.

Dekan FK Tolak Hadiri Diskusi

Awal mula muncul desakan pencopotan Menkes Budi dari para guru besar di bidang ilmu kedokteran dan para dekan Fakultas Kedokteran di Indonesia.

Gelombang protes datang dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Negeri Solo (UNS), Universitas Airlangga, dan dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI).

Di Fakultas Kedokteran UI, Lebih

dari 100 guru besar menyatakan keprihatinan atas sejumlah kebijakan baru Kementerian Kesehatan.

Regulasi itu meliputi soal perubahan tata kelola kolegium, pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan, dan restrukturisasi dengan institusi pendidikan setelah penetapan RS Pendidikan Utama.

Perwakilan Guru Besar FK UI Siti Setiati mengatakan, ada beberapa aturan pemerintah yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis.

Hal itu, kata dia, berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. "Kini kami prihatin karena kebijakan kesehatan nasional saat ini menjauh dari semangat kolaboratif tersebut," kata Siti di Gedung FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).

Menurut Siti, para guru besar menilai bahwa alih-alih memperkuat mutu layanan dan pendidikan, pemerintah justru membuat kebijakan yang menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis.

Padahal, pendidikan dokter bukanlah proses sederhana, melainkan perjalanan akademik panjang yang hanya dapat terwujud melalui rumah sakit pendidikan yang mengintegrasikan pelayanan, pengajaran, dan penelitian sesuai standar global.

Para guru besar FKUI juga kecewa dengan Kementerian Kesehatan yang tidak menjalankan pemilihan kolegium sesuai Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023. L

Guru Besar FKUI merasa

kolegium kedokteran kini telah kehilangan independensinya karena adanya perubahan tata kelola yang saat ini berada di bawah Kementerian Kesehatan. Protes kepada Budi Gunadi juga datang dari para guru besar ilmu kedokteran Unpad.

Guru Besar FK Unpad membacakan Maklumat Padjadjaran sebagai bentuk kritik terbuka terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang dinilai mengancam masa depan pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan di Indonesia. Maklumat ini ditujukan langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, dan dibacakan secara resmi di lobi Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Unpad, Jalan Prof Eyckman, Kota Bandung, pada Senin (19/5/2025).

Salah satu puncak kritikan terjadi saat agenda pertemuan antara Kementerian Kesehatan dan para dekan fakultas kedokteran di sejumlah perguruan tinggi yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Jumat (23/5/2025), dibatalkan karena tidak ada undangan yang hadir. Menurut rencana, koordinasi lebih lanjut akan dilakukan oleh para dekan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Sebelumnya, para dekan fakultas kedokteran yang diundang oleh Kementerian Kesehatan terkait diskusi strategis pembangunan kesehatan nasional sudah menyatakan tidak akan menghadiri undangan tersebut. Sampai Kamis malam, Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa agenda tersebut masih terjadwal. Namun, pada Jumat siang baru dipastikan bahwa agenda tersebut dibatalkan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman saat dihubungi di Jakarta, Jumat (23/5/2025). "(Acaranya) batal karena tidak ada yang hadir," ujarnya.

Adapun acara tersebut mengundang sejumlah pejabat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknasaintek) serta 26 dekan fakultas kedokteran dari perguruan tinggi, antara lain dekan fakultas kedokteran Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Pelita Harapan, dan Universitas Yarsi Jakarta.

Dalam undangan disebutkan bahwa tujuan diskusi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung prioritas pembangunan kesehatan nasional dan percepatan transformasi sistem kesehatan. Dalam diskusi ini juga diharapkan ada dialog antara Kementerian Kesehatan dan para dekan fakultas kedokteran.

Dihubungi secara terpisah, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang juga Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Budi Santoso mengatakan, para dekan fakultas kedokteran sudah sepakat untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Keputusan ini bukan berarti tidak menghargai undangan yang diberikan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga integritas institusi akademik. (wid,din,ist,tmo,ant/dya)

Istana Tampung Usulan: Kita Pelajari

PIHAK Istana Negara merespons permintaan para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) yang mendesak evaluasi hingga penggalangan petisi pencopotan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dari jabatannya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah mendengarkan dengan serius setiap aspirasi dari masyarakat, khususnya komunitas medis.

"Dokter kan adalah individu-individu atau insan-insan pilihan. Pasti memberikan masukan itu berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang," ujar Prasetyo Hadi, dikutip Minggu (25/5/2025).

Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden itu mengatakan pemerintah telah menerima masukan tersebut, baik secara resmi maupun informasi yang diperoleh melalui pemberitaan media massa. Masukan itu tengah

dipelajari secara mendalam guna menemukan akar persoalan dan merumuskan solusi yang tepat.

"Karena semua pihak pasti punya niat yang baik. Forum-forum asosiasi profesi dokter tentu menginginkan kebaikan untuk sistem kesehatan kita," katanya.

Terkait kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dinilai tidak sesuai dengan AstaCita, visi pembangunan nasional, Prasetyo menegaskan perlunya komunikasi dan evaluasi bersama. Ia juga menyebutkan jika ada catatan dalam proses penyusunan kebijakan, hal itu perlu diperbaiki tanpa perlu mengganggu layanan kesehatan masyarakat.

Desakan terhadap Menkes Budi Gunadi Sadikin mencuat setelah 121 guru besar FKUI mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti kondisi sistem pendidikan kedokteran dan kesehatan yang dinilai memprihatinkan.

Mereka mengkritik narasi negatif terhadap profesi dokter serta perubahan tata kelola kolegium kedokteran di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dianggap mengancam independensi dan objektivitas lembaga profesi, serta menyerukan pentingnya dialog dan kemitraan antarlembaga.

Selain itu tekanan publik juga datang melalui petisi daring yang menuntut pencopotan Menkes Budi dibuat oleh Sekretariat Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa sejak 4 Mei 2025.

Petisi tersebut menilai kebijakan Menkes Budi tidak berpihak pada rakyat dan profesionalisme kesehatan, termasuk penghentian sepihak program PPDS, pembukaan fakultas kedokteran tanpa perencanaan distribusi SDM, hingga promosi asuransi swasta dan penggunaan influencer untuk kebijakan publik. (din,wid,ist,kum,tmo/dya)

Deadline Dirjen Pajak dan Bea Cukai Baru: Satu Bulan Belajar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan waktu satu bulan kepada dua pejabat barunya, yakni Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama.



Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama saat konferensi pers APBN Kita di Jakarta.ist

Kritik yang mengatakan penunjukan Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menabrak prinsip meritokrasi diharapkan tak ganggu kinerja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada awak media untuk memberi ruang kepada Bimo dan Djaka untuk mempelajari berbagai isu strategis yang akan mereka hadapi di posisi barunya.

"Kayanya teman-teman (media) akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Djaka dan Pak Bimo. Gak fair baru tiga jam sudah ditanya banyak hal," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (23/5).

Untuk itu, Kementerian Keuangan berencana menggelar sesi briefing khusus dalam waktu sekitar satu bulan ke depan, agar media dan publik bisa lebih mengenal dua dirjen baru tersebut.

"Jadi beliau nanti akan membutuhkan waktu satu bulan, namun beliau (Djaka) akan insyallah naik haji, mungkin naik haji sambil belajar mengenai materi supaya waktu pulang bisa memberikan briefing kepada teman-teman," imbuh Menkeu

Djaka Singgung Pelabuhan Gelap

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama membeberkan rencananya menggandeng aparat TNI dan Polri dalam memberantas praktik penyelundupan yang selama ini masih menjadi celah dalam sistem penerimaan negara.

Ia menyebutkan langkah tersebut bagian dari perintah Presiden Prabowo Subianto yang memintanya mengawal kinerja Ditjen Bea Cukai dalam mendukung penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan.

Banyak pelabuhan-pelabuhan gelap, kata Djaka, yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan di TNI dan Polri. "Mungkin salah satu intinya

adalah untuk itu, memastikan tidak ada penyelundupan atau mengurangi penyelundupan sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target," katanya.

Lebih jauh Djaka menjelaskan, koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan barang masuk maupun keluar wilayah Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya melantik Djaka sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang baru menggantikan Askolani. Dalam sambutannya, Bendahara Negara itu berharap kehadiran Djaka dapat

memperkuat sinergi lintas lembaga.

"Maka kehadiran Pak Djaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum dan instansi-instansi lainnya," tuturnya.

Selain itu, kata Sri Mulyani, penting untuk menjaga kerja sama antarkementerian dan lembaga untuk mengamankan penerimaan negara, baik dari sektor pajak maupun non-pajak, serta memperbaiki citra lembaga perpajakan dan kepabeanan di mata publik. (wid,rls,ist/dya)

Gerindra Respons Kritik Terkait Meritokrasi

WAKIL Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sudaryono, merespons ihwal kritik yang mengatakan bahwa penunjukan Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan dinilai menabrak prinsip meritokrasi. Sudaryono menilai meritokrasi tidak bisa dimaknai secara sempit.

"Meritokrasi itu kan ibaratnya pilihan berdasarkan kemampuan. Pilihan berdasarkan kemampuan itu kan, oke ada satu mekanismenya mekanisme yang umum, tapi meritokrasi artinya begini, ini kan banyak kemudian semua mampu, dari yang mampu itu banyak, dari yang mampu itu kan ada yang bisa dipilih dong," ujar Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, (25/5/2025).

Wakil Menteri Pertanian itu juga memberi contoh soal pemilihan pemilu yang pada dasarnya adalah merupakan sistem meritokrasi. Pemilu, kata Sudaryono, siapa yang mampu mendapatkan dukungan rakyat, maka dia yang terpilih.

"Satu di antara yang mampu, selalu pilihan itu begitu, gak harus di dirjen, ketua OSIS whatever itu semua, pemilu kita itu meritokrasi siapa yg mampu mendapatkan dukungan rakyat dia yang jadi," tuturnya.

Sudaryono membeberkan kritik terhadap pemilihan pejabat adalah hal yang wajar, namun Sudaryono meminta hal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Sudaryono mengemukakan penunjukan Letjen Djaka dan Bimo sudah melalui penilaian dan pertimbangan yang matang.

"Tapi pada kenyataannya begitu

Sri Mulyani telah melantik 22 pejabat eselon I Kemenkeu. Berikut adalah rinciannya:

1. Dirjen Pajak: **Bimo Wijayanto**
2. Dirjen Bea dan Cukai: **Djaka Budi Utama**
3. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: **Masyita Cristalline**
4. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: **Febrio Nathan Kacaribu**
5. Dirjen Anggaran: **Luky Alfirman**
6. Dirjen Perimbangan Keuangan: **Askolani**
7. Dirjen Perbendaharaan: **Astera Primanto Bhakti**
8. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: **Suminto**
9. Dirjen Kekayaan Negara: **Rionald Silaban**
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan: **Heru Pambudi**
11. Inspektur Jenderal: **Awan Nurmawan Nuh**
12. Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan: **Suryo Utomo**
13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: **Andin Hadiyanto**
14. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: **Iwan Djuniardi**
15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak: **Yon Aرسال**
16. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak: **Nufransa Wira Sakti**
17. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara: **Dwi Teguh Wibowo**
18. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: **Mochmad Agus Rofudin**
19. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara: **Sudarto**
20. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: **Parjiono**
21. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: **Arief Wibowo**
22. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: **Rina Widiyanti Wahuningdyah**

jadi ada saja yang berkomentar mengambil sisi yang berbeda, menurut saya sih itu salah satu hal yang wajar, biasa dan tak perlu dibesar-besarkan," tegasnya.

"Jadi kalau meritokrasi secara sistem pribadinya pak Bimo dan pak Djaka, dari sisi kerjanya bisa dilihat kemudian bahwa pilihan jatuh kepada beliau-beliau atas banyak pertimbangan dengan dipilih itu tinggal kita lihat perform enggak," pungkasnya. (wid,rls,ist/dya)